

Kependudukan dan Transmigrasi dalam Perspektif Pembangunan Nasional

Prijono Tjiptoherijanto

Abstract

Indonesia with its large population, numbering 196 million in 1995, is according to the present projection figures still expected to grow at a relatively high rate during the next few decades reaching 209.5 million by the year 2000 and 261.4 million by the year 2025. However, geographical distribution of the population is very uneven. According to 1995 figures, 58.9% of the population are living in Java, another 21% in Sumatra, whereas the rest are dispersed among the many sparsely populated islands. Due to population mobility, Java will in the future attract more migrants from the other islands, increasing its density substantially from 813 people per.km² in 1990 to 1,093 in 2020. The respective figures for Sumatra are 77 and 128, for Kalimantan 17 and 31, and for the Moluccas and West Irian 7 and 14. Obviously, the solution to the uneven geographical distribution of the population is transmigration from the densely populated to the sparsely populated islands. On the other hand, population mobility has an impact on regional development, not only between Java and the outer islands, but also between cities and rural areas.

I. PENDAHULUAN

Dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah tanah air telah meningkatkan partisipasi angkatan kerja termasuk angkatan kerja wanita. Demikian pula halnya dengan persebaran penduduk melalui pembangunan transmigrasi dan penyebaran angkatan kerja antar daerah (AKAD) telah makin menyeimbangkan persebaran penduduk di daerah luar Pulau Jawa. Perpindahan penduduk ke luar Pulau Jawa melalui program transmigrasi selama Pembangunan Jangka Panjang I berjumlah 8 juta orang. Dibandingkan dengan angka migrasi ke Pulau Jawa, jumlah migrasi ke luar Pulau Jawa masih lebih besar. Dengan berkembangnya program transmigrasi ke luar Pulau Jawa telah tercipta lapangan kerja baru sekitar 1,5 juta keluarga (Tjiptoherijanto, 1995).

Program transmigrasi akan menciptakan persebaran tenaga kerja yang lebih merata di seluruh wilayah Nusantara, yang pada gilirannya akan memperluas lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, mengembangkan potensi daerah, mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah, membantu mengentaskan rakyat dari kemiskinan, dan pada

gilirannya akan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

GBHN 1993 memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperluas penyebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai wilayah tanah air, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan para transmigran khususnya dan masyarakat pada umumnya, memperkuat pertahanan keamanan negara serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebijaksanaan transmigrasi didasarkan pada kebutuhan pembangunan daerah serta sumber daya dan kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga mendorong peningkatan transmigrasi swakarsa dan mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Sasaran kualitatif yang ingin dicapai khususnya dalam penyelenggaraan transmigrasi Pelita VI adalah bertambahnya minat dan gerak masyarakat untuk bertransmigrasi dengan kemampuan sendiri, membuka akses daerah transmigrasi terhadap pasar, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan sasaran kuantitatif yang ingin dicapai dalam Repelita VI adalah penempatan transmigran baru sebanyak 600.000 KK yang terdiri dari 250.000 KK Transmigran Swakarsa Mandiri serta 350.000 KK Transmigran Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan. Diantara 350.000 KK tersebut termasuk didalamnya 90.000 KK transmigran yang berasal dari para peladang berpindah dan perambah hutan. Untuk menempatkan 600.000 KK tersebut akan dibuka 1.089 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) pada luas areal sekitar kurang lebih 500.000 Ha (Ahmad, 1995).

Menurut Sensus Penduduk 1990 jumlah penduduk Indonesia sebesar 173.965.723 jiwa. Diduga pada tahun 2025 penduduk Indonesia sudah akan mencapai 278 juta jiwa. Dengan jumlah ini berarti kepadatan rata-rata penduduk Indonesia kurang lebih 76,84 jiwa/km². Pokok permasalahannya adalah bukan hanya jumlah penduduk yang besar, tetapi juga sangat timpangnya persebaran penduduk yang tinggal di Pulau Jawa dengan penduduk di luar Pulau Jawa. Jumlah penduduk Pulau Jawa menurut Sensus Penduduk 1990 sudah mencapai 107.573.749 jiwa dengan kepadatan penduduk 690 jiwa/km². Kalau kita masuk lebih dalam lagi, jumlah penduduk Jawa Tengah sudah mencapai 28.521.692 jiwa dengan kepadatan 742 jiwa/km². DKI Jakarta jumlah penduduknya

8.254.035 jiwa dengan kepadatan 11.023 jiwa/km². Jumlah penduduk DKI Jakarta ini diperkirakan pada tahun 2005 sudah akan mencapai 15.606.003 jiwa. Sebagian pertambahan itu dari migrasi masuk sekitar 2,66 juta jiwa. Jumlah penduduk Pulau Jawa ini diperkirakan pada tahun 1995 sudah mencapai 116.144.711 jiwa. Sedangkan Irian Jaya pada tahun 1990 jumlah penduduknya baru mencapai 2,78 jiwalkm². Pulau Jawa yang luasnya 132.187 km² atau 6,8% dari luas daratan Indonesia dihuni oleh 107.573.749 jiwa atau 59,9% penduduk Indonesia. (Ahmad, 1995).

Ketimpangan persebaran penduduk di daerah Jawa-Bali-Lombok (JAMBAL) dengan luar JAMBAL mengakibatkan sumber daya alam di daerah padat penduduk mengalami tekanan eksploitasi berlebihan, sedangkan di daerah jarang penduduk kurang dikelola secara efektif. Sementara itu, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa sebagian besar adalah para petani dan buruh tani beserta keluarganya yang relatif berpendidikan rendah. Sebaliknya, perpindahan penduduk ke Pulau Jawa sebagian besar berusia muda, belum menikah serta relatif lebih berpendidikan. Keadaan ini kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di luar Pulau Jawa.

Gambaran mengenai ketimpangan jumlah penduduk diperkirakan masih terus terjadi baik antardaerah, antarwilayah, maupun antar pulau. Dengan kondisi demikian, pada satu pihak akan terdapat wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk yang semakin besar, dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi, namun lingkungan hidupnya juga semakin rusak karena terbebani berat oleh pembangunan, sehingga terjadilah ketidakseimbangan antara penduduk dengan lingkungan. Di pihak lain, terdapat daerah-daerah yang sangat kekeurangan penduduk dan langka tenaga kerja, sehingga potensi-potensi sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan nasional. Ini juga merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan yang lain. Persoalan-persoalan seperti itu perlu dipecahkan dalam rumusan-rumusan kebijaksanaan operasional.

Disadari bahwa penanganan keseimbangan persebaran penduduk tidak dapat ditangani oleh satu sektor/instansi tetapi harus melibatkan berbagai sektor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi antar sektor yang terkait baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Sebagaimana implikasi dari terjadinya berbagai perubahan dalam aspek kependudukan, mobilitas penduduk dan persebaran penduduk haruslah kita arahkan dengan sungguh-sungguh agar dalam negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita ciptakan kondisi keseimbangan antar daerah, antarwilayah maupun antarpulau. Untuk menilai keseimbangan itu haruslah mencakup: keseimbangan penduduk dengan lingkungan sosial-budayanya (termasuk ekonomi dan politik), keseimbangan penduduk dengan lingkungan alamnya, serta keseimbangan penduduk dengan lingkungan fisik binaan yang diciptakannya sendiri.

Dengan pendekatan tersebut kebijaksanaan pengarahannya persebaran dan mobilitas penduduk yang diperlukan adalah kebijaksanaan pembangunan yang diarahkan untuk semakin mendekatkan pada pencapaian kondisi keseimbangan antara penduduk dan lingkungan hidup setiap daerah. Dengan demikian, pencapaian kondisi persebaran penduduk yang optimal, haruslah didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan masing-masing daerah. Hal itu telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang memberikan penekanan sangat besar terhadap penciptaan kondisi selaras, serasi dan seimbang antara kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Dengan mengetahui kecenderungan kependudukan yang akan terjadi, maka pembangunan sosial ekonomi dapat kita rencanakan dan kita arahkan secara lebih baik. Untuk itu kita perlu berpedoman pada ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan penduduk dan daerah yang seimbang, yaitu (1) terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk daerah itu, (2) meningkatnya usaha-usaha produktif bagi penduduk, dan (3) memberikan hasil yang dapat dinikmati secara semakin meluas bagi penduduk (Suyono, 1995)

II. KEADAAN DAN MASALAH KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Indonesia termasuk keempat terbesar di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk Indonesia

cukup tinggi, yaitu 2,3% per tahun untuk periode 1971-1980. Dalam periode 1980-1990 laju pertumbuhan turun menjadi 2% per tahun dan dalam periode 1980-2000 diperkirakan turun menjadi 1,8% per tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut penduduk Indonesia akan bertambah dari 183,5 juta pada tahun 1990 menjadi 210,9 juta pada tahun 2000. Keadaan ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan besar seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang sudah tentu menjadi beban pembangunan nasional itu sendiri (Tabel 1).

Tabel 1
Perkiraan Jumlah Penduduk 1971-2025

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)
1971	118,4
1980	146,8
1990	179,0
1995	196,0
2000	209,5
2005	222,8
2010	235,1
2015	249,7
2020	254,2
2025	261,4

Sumber: Ananta dan Anwar, 1994.

Selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut umur sangat penting dalam hubungan dengan kebutuhan (penduduk sebagai beban) dan partisipasinya (penduduk sebagai pelaku) dalam proses pembangunan.

Di dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: (kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas. Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk umur muda sebanyak 40% atau lebih, sementara proporsi kelompok umur tua kurang atau sama dengan 5%. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak 30% atau kurang, sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau sama dengan 10% (Tabel 2).

Berdasarkan kategori-kategori tersebut struktur umur penduduk Indonesia menurut propinsi pada tahun 1990 tidak semuanya termasuk muda maupun tua. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, dan

1990 telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (aging proses) (Kasto, 1995).

Tabel 2
Perkiraan Struktur Umur Penduduk, Indonesia: 1990-2010

Komposisi Umur	1990		1995		2000		2005		2010	
	Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%
0-14	66,0	36,7	65,4	33,5	64,4	30,6	64,6	28,7	64,5	27,0
15-64	107,2	59,6	121,7	62,3	136,3	64,8	145,9	64,8	161,3	67,5
65+	6,6	3,7	8,2	4,2	9,7	4,6	14,7	6,5	13,1	5,5
Jumlah	179,8	100,0	195,3	100,0	210,4	100,0	225,2	100,0	238,9	100,0

Sumber: BPS, 1993b.

Pergeseran struktur umur muda ke umur produktif akan membawa konsekuensi pada peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedangkan pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga ke institusi. Apabila ini terjadi maka tanggung jawab pemerintah akan menjadi berat.

Masalah lainnya adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, karena sekitar 60% penduduk berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 6,9% dari luas daratan Indonesia. Sedangkan Kalimantan yang mempunyai luas 28,1% dari luas seluruh daratan Indonesia hanya dihuni oleh 5,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Penyebaran di luar Pulau Jawa sendiri juga tidak merata dan banyak yang tersebar dan terpencil, sehingga sangat sukar dijangkau dan mahal dalam penyediaan kemudahan-kemudahan yang diperlukan (Tabel 3).

Tabel 3
Distribusi Penduduk Indonesia menurut Pulau, 1930, 1961, 1971,
1980, 1990 dan 1995

Pulau	Luas (%)	Penduduk (Juta)											
		1930		1960		1971		1980		1990		1995*	
		Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%	Juta	%
Jawa	6,9	41,7	68,5	63,0	64,9	76,1	63,8	91,3	61,9	107,5	60,2	115,0	58,9
Sumatera	24,7	8,2	13,5	15,7	16,2	20,8	17,4	28,0	19,0	36,0	20,1	41,0	21,0
Sulawesi	9,9	4,2	6,9	7,1	7,3	8,5	7,1	10,4	7,1	12,5	7,0	13,8	7,1
Kalimantan	28,1	2,2	3,6	4,1	4,2	5,2	4,4	6,7	4,5	9,1	5,1	10,5	5,4
Pulau lainnya	30,4	4,6	7,6	7,1	7,3	8,6	7,2	11,1	7,5	13,6	7,6	15,0	7,7
Jumlah	100,0	60,9	100,0	97,0	100,0	119,2	100,0	147,5	100,0	178,7	100,0	195,3	100,0

Sumber: Mantra, Ida Bagoes dan Nasruddin Harahap, 1993 (Tabel 1.1).

* BPS, 1996 (tabel 1).

Mengelompoknya sebagian besar penduduk di Pulau Jawa antara lain disebabkan Jawa yang menarik bagi para migran tidak lepas dari peran Jakarta sebagai ibukota negara, pusat kegiatan Pemerintah dan juga pusat kegiatan ekonomi, sehingga oleh para pendatang dianggap memberi peluang kesempatan kerja, kemungkinan peluang usaha dan upah yang lebih tinggi di luar peluang sosial politik lainnya. Faktor lain yang tidak kalah penting, adalah anggapan bahwa Jawa sebagai pusat pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan, sehingga banyak didatangi kaum migran, khususnya kaum muda yang berusaha menambah pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

Penurunan persentase penduduk Pulau Jawa dari 68,7% pada tahun 1930 menjadi 60% pada tahun 1990 diikuti oleh kenaikan yang cukup mencolok dari persentase penduduk di Pulau Sumatera. Sedangkan pulau-pulau lainnya hanya mengalami sedikit kenaikan. Ini berarti bahwa terjadi aliran penduduk dari Pulau Jawa menuju Sumatera diikuti menuju Pulau Kalimantan dan seterusnya.

Migrasi interregional antar pulau kebanyakan menuju ke Pulau Jawa. Meskipun sejak tahun 70-an terlihat kecenderungan arus migrasi mulai beralih ke luar Jawa, namun konsentrasi penduduk Indonesia masih terpusat di pulau ini. Bahkan selama 50 tahun terakhir sejak Sensus Penduduk pertama tahun 1930 hingga Sensus Penduduk 1990 tampak pertumbuhan penduduk Pulau Jawa masih tertinggi (8,7% per tahun) dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya (Sumatera 6,8%, Sulawesi 1,5%, Kalimantan 0,1%, pulau lainnya 0,3% per tahun (Departemen Transmigrasi, 1994).

Penurunan persentase penduduk di Pulau Jawa dan kenaikan persentase penduduk di pulau lainnya memang merupakan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian ini tidak terlepas dari keberhasilan program Transmigrasi serta pembangunan yang semakin merata diseluruh wilayah Nusantara ini.

Pertambahan jumlah penduduk akan menjadi tantangan bagi pembuat kebijaksanaan. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk selama PJP II maka kepadatannya akan terus meningkat. Kepadatan penduduk pada PJP II akan menjadi 1,45 kali lipat kepadatan penduduk pada PJP I (Tabel 4).

Tabel 4
Kepadatan Penduduk menurut Wilayah, Indonesia, 1990-2020

Wilayah	Luas (km ²) ^a	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk	
		1990 ^a	2020 ^b	1990 ^a	2020 ^b
Sumatera	473.606	36.470.399	60.780.944	77	128
Jawa	132.187	107.523.322	144.515.191	813	1.093
Bali+NTT, NTB+ Tim-Tim	88.488	10.161.289	15.926.312	115	180
Kalimantan	539.460	9.095.524	16.628.880	17	31
Sulawesi	189.216	12.510.024	19.099.311	66	101
Maluku+Irian Jaya	496.486	3.482.830	7.130.692	7	14
Nasional	1.919.443	179.243.375	254.214.909	93	132

Sumber: a. BPS, 1992

b. Proyeksi Penduduk Indonesia, Ananta dan Anwar 1994.

Sampai akhir PJP II Pulau Jawa tetap merupakan pulau terpadat yaitu 1.093 jiwa per km² tahun 2020, sedangkan Maluku dan Irian Jaya mempunyai kepadatan paling rendah yaitu 14 jiwa/km². Jika dilihat dari konsentrasi penduduk Indonesia, maka kurang lebih 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa, dan kurang lebih 20% tinggal di Sumatera. Persentase distribusi geografis ini tidak mengalami perubahan yang berarti selama PJP II.

III. MOBILITAS PENDUDUK

Menurut hasil Sensus Penduduk 1990 dari sejumlah 179,3 juta penduduk Indonesia, sebanyak 17,8 juta atau sebanyak 9,9% berstatus migran. Angka ini berasal dari 11,4 juta atau 7,8% dari jumlah penduduk sebanyak 147,5 juta pada sensus 1980. Ini berarti terjadi kenaikan migran sebanyak 2,1% atau 6,4 juta selama kurun waktu sepuluh tahun atau sekitar 640.000 jiwa setiap tahun. Angka ini sekaligus menjawab bahwa tidak benar apabila dikatakan bahwa mobilitas penduduk Indonesia rendah. Pernyataan tersebut semakin tidak benar apabila diperhitungkan mobilitas penduduk non permanen baik sirkulasi maupun ulang alik.

Selama kurun waktu 1980-1990 tidak terjadi pergeseran proporsi migran antar propinsi di Indonesia, yaitu proporsi paling kecil dijumpai di Nusa Tenggara Timur dan proporsi paling besar dijumpai di DKI Jakarta. Maing-masing untuk tahun 1980 sebesar 2,1% dan 40,7%, sedang untuk tahun 1990 sebesar 2,4% dan 39,3%. Meskipun secara relatif angka-angka ini tidak banyak berbeda, namun secara absolut perbedaan

tersebut cukup besar (Tabel 5).

Tabel 5
Persentase Migran Penduduk Indonesia menurut Propinsi tahun 1980 dan 1990

No.	Propinsi	1980		1990	
		Non Migran	Migran	Non Migran	Migran
1	D.I. Aceh	93,7	6,3	93,4	6,6
2	Sumut	92,6	7,4	64,5	5,5
3	Sumbar	92,7	7,3	89,8	10,2
4	Riau	82,8	17,2	78,1	21,9
5	Jambi	78,7	21,3	75,6	24,4
6	Sumsel	86,0	14,0	84,0	16,0
7	Bengkulu	83,0	17,0	7,3	22,7
8	Lampung	60,8	39,2	70,6	29,4
	Sumatera	84,6	15,4	85,1	14,9
9	DKI Jakarta	59,3	40,7	60,7	39,3
10	Jabar	95,4	4,6	91,3	8,7
11	Jateng	97,7	2,3	95,6	4,4
12	D.I. Yogyakarta	91,7	8,3	86,3	13,7
13	Jatim	97,9	2,1	96,7	3,3
	Jawa	94,2	5,8	91,6	8,4
14	Bali	96,7	3,3	94,7	5,3
15	NTB	97,4	2,6	96,9	3,1
16	NTT	97,9	2,1	97,6	2,4
17	Timor Timur	-	-	93,4	6,6
	Bali+Nusa Tenggara	97,4	2,6	96,3	3,7
18	Kalbar	95,2	4,8	93,3	6,7
19	Kalteng	84,3	15,7	81,7	18,3
20	Kalsel	92,2	7,8	87,5	2,5
21	Kaltim	75,0	25,0	67,1	32,9
	Kalimantan	89,1	10,9	84,5	15,4
22	Sulut	93,4	6,6	94,3	5,7
23	Sulteng	84,4	15,6	81,8	18,2
24	Sulsel	97,1	2,9	94,8	5,2
25	Sultra	87,3	12,7	80,0	20,0
	Sulawesi	93,9	6,1	91,3	8,7
26	Maluku	90,0	10,0	88,6	11,4
27	Irian Jaya	90,9	9,1	83,4	16,6
	Indonesia	92,2	7,8	90,1	9,9

Sumber: Mantra, 1993.

Sebagai salah satu komponen pertumbuhan penduduk, migrasi diukur dengan angka/tingkat migrasi netto yaitu migran masuk dikurangi dengan migran keluar. Jika angkanya positif berarti lebih

banyak migrasi masuk daripada yang keluar. Tetapi apabila nilainya negatif berarti migran keluar lebih banyak daripada yang masuk. Migrasi neto negatif paling besar terdapat di D.I. Yogyakarta yaitu -0,66% per tahun. Migrasi neto positif paling tinggi dijumpai di Kalimantan Timur yaitu sebesar 2,2% per tahun. Banyaknya migrasi keluar D.I. Yogyakarta berkaitan dengan

kondisi lahan pertanian yang tidak seluruhnya menguntungkan, sehingga banyak penduduk yang mengadu nasib di luar D. I. Yogyakarta. Sebaliknya di Kalimantan Timur karena terbukanya kesempatan kerja yang besar mengakibatkan banyak migrasi yang masuk. Apabila penduduk suatu daerah merupakan faktor dominan sebagai pelaku pembangunan, angka migrasi neto negatif perlu diantisipasi mengingat kelompok migran ini merupakan kelompok potensial yang produktif baik ditinjau dari umur migran, pendidikan maupun kondisi kesehatan.

Data sensus menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1990 arus utama migrasi interregional atau migrasi antar pulau masih didominasi pada lintasan Jawa-Sumatera. Migran ke luar dari Jawa menuju Sumatera terutama berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka adalah terdiri dari transmigran yang kemudian diikuti oleh sanak saudaranya. Sedangkan arus balik dari Sumatera ke Jawa terutama berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Migran yang masuk ke Jawa ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya sangat kuat dalam mempengaruhi arus atau gerak migrasi. Mereka terkenal sebagai kelompok-kelompok etnik yang secara tradisional dikenal dinamis dan berjiwa perantau.

Selain itu karena penurunan fertilitas, jumlah anak yang semakin sedikit, seseorang akan lebih mobil. Mobilitas penduduk yang tinggi diperlukan di Indonesia. Seluruh suku yang ada perlu memiliki mobilitas yang tinggi. Dengan mobilitas yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakatnya, lautan-lautan diantara kepulauan-kepulauan Nusantara ini akan menjadi perekat kesatuan Nusantara. Untuk menunjang hal itu, pengembangan mobilitas penduduk amat diperlukan. Membuat masyarakat membaur adalah penting untuk negara kepulauan yang heterogen ini.

IV. TRANSISI MOBILITAS

Mobilitas penduduk pada awal mulanya didominasi oleh mobilitas nonpermanen yang merupakan mobilitas jarak pendek dan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Pada tahap selanjutnya, mobilitas menjadi lebih jauh dan disertai dengan menetap ditempat lain (mobilitas permanen). Dengan makin majunya sarana, prasarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk nonpermanen--khususnya ulang alik (commuting)-- kembali memainkan peran penting.

Transisi mobilitas tersebut secara lebih rinci dibagi dalam tujuh tahapan. Tahap pertama, disebut tahap "masyarakat pratransisi" (*pre-transitional society*) (Ananta, 1995). Pada tahap ini sebagian besar mobilitas yang terjadi merupakan mobilitas nonpermanen. Walau begitu, mobilitas ini tidak hours merupakan mobilitas jangka pendek. Pada tahap ini dapat pula terjadi mobilitas permanen dalam bentuk kolonisasi ataupun pembukaan daerah pertanian baru. Di Indonesia, mobilitas dalam bentuk pembukaan daerah pertanian dapat dijumpai dalam kasus transmigrasi.

Pada tahap kedua, yaitu tahap "masyarakat transisi awal" (*early transitional society*), terjadi percepatan dalam mobilitas nonpermanen ke daerah perkotaan, daerah perkubunan, atau daerah pertambangan. Mobilitas semacam ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan perdesaa. Penghasilan penduduk yang mobil ini membantu meningkatkan pendapatan di perdesaan.

Pada tahap kedua ini juga terlihat adanya mobilitas penduduk dari satu daerah perkotaan ke daerah perkotaan yang lain, dengan kota besar sebagai tujuan utama migrasi dari kota kecil dan menengah. Gejala ini menimbulkan stagnasi pada pertumbuhan kota kecil dan menengah. Pada tahap ini terjadi peningkatan pesat dalam mobilitas ke daerah baru; dan migrasi masih didominasi oleh penduduk laki-laki.

Tahap ketiga, terjadi peningkatan partisipasi penduduk perempuan dalam migrasi penduduk ke kota besar. Di tahap "masyarakat transisi menengah" (*intermediate transitional society*) ini terlihat pula adanya migrasi dari daerah yang berdekatan dengan kota besar ke kota besar itu sendiri. Migrasi dari daerah sekitar kota besar ini dapat menyebabkan stagnasi pada daerah sekitar kota besar tersebut. Mobilitas dari perdesaan ke perdesaan menurun dan mobilitas dari perkotaan ke perkotaan terus meningkat.

Apabila disimak kondisi mobilitas penduduk Indonesia saat ini, maka Indonesia sedang berada pada kondisi tahap keempat, yaitu dikenal sebagai tahap "masyarakat transisi akhir" (*late transitional society*). Ciri-ciri utama dari tahap ini adalah terdapatnya "megacity" (yaitu DKI Jakarta) dan adanya kota-kota besar yang menjadi daerah tujuan utama dari migrasi. Migrasi tidak lagi dari perdesaan ke kota kecil, kota menengah, lalu ke kota besar sebagaimana terjadi pada tahap-tahap yang lebih awal dari transisi mobilitas; tetapi secara langsung dari perdesaan ke kota besar, dan secara mencolok didominasi oleh migran perempuan. Ciri lainnya adalah migrasi internasional juga mulai terjadi secara cukup berarti, yaitu dengan jumlah yang cukup banyak, khususnya sebagai tenaga kerja internasional. Di pihak lain, juga terus terjadi penurunan jumlah penduduk perdesaan.

Sementara itu jika dilihat selanjutnya pada tahap kelima, yaitu dikenal sebagai tahap "masyarakat mulai maju" (*early advanced society*), maka ciri utamanya adalah urbanisasi telah mencapai 50%, dan mobilitas dari perdesaan ke perkotaan menurun. Pada tahap ini mulai terjadi "suburbanisasi" dan "dekonsentrasi" penduduk perkotaan, atau terjadilah peningkatan mobilitas penduduk dari kota besar ke daerah pinggiran dan penyebaran pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin meluas. Di Indonesia saat ini, urbanisasi secara nasional baru mencapai sekitar 3435 persen, dan baru 5 (lima) propinsi yang akan mempunyai angka penduduk urban di atas 50% pada tahun 2000, yaitu DKI Jakarta, D. I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Jawa Barat (Suyono, 1996).

Dengan kondisi itu, jika dapat dilakukan rekayasa "urbanisasi perdesaan", ini suatu istilah yang belum lazim secara internasional, merupakan istilah baru bangsa Indonesia yang perlu kita perkenalkan dalam literatur demografi, yang dapat diartikan sebagai "upaya-upaya untuk mempercepat terjadinya proses urbanisasi pada daerah-daerah perdesaan", maka diharapkan akan dapat diciptakan pertumbuhan kota-kota kecil baru sebagai penyangga yang akan dapat "mengerem" arus migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Pertumbuhan kota-kota kecil seperti itu akan meningkatkan terjadinya pola-pola mobilitas ulang-alik, karena penduduk tidak perlu mencari nafkah di tempat yang jauh dan menetap di kota lain, sebab telah mulai kerasan di daerah yang menjadi berkembang sebagai hasil pembangunan yang mereka lakukan

sendiri. Transportasi yang baik tentu saja sangat berperan dalam meningkatkan arus ulang alik dan mengurangi mobilitas (migrasi) permanen itu.

Tahap keenam disebut tahap "masyarakat maju lanjut" (late advanced society) yang ditandai dengan terus terjadinya dekonsentrasi penduduk perkotaan. Penduduk perkotaan semakin menyebar ke daerah pinggiran dan perkotaan yang lebih kecil, karena daerah-daerah perdesaanpun telah semakin menjadi masyarakat yang maju dan berciri perkotaan, sehingga masyarakat perkotaan tidak segan-segan lagi untuk tinggal di daerah yang beberapa tahun sebelumnya masih merupakan daerah-daerah perdesaan. Pada saat itu juga dapat terjadi peningkatan arus masuk pekerja asing, terutama migran dari negara yang masih berada dalam tahap keempat. Mobilitas ulang alik akan terjadi sangat pesat, baik oleh laki-laki maupun perempuan, sebagai masyarakat modern yang mempunyai ciri gaya hidup selalu bergerak dinamis untuk meraih kebutuhan dan kepuasan hidup.

Tahap ketujuh disebut sebagai tahap "masyarakat super maju" (super advanced society), yang banyak diwarnai oleh adanya teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi. Pada saat ini sangat mungkin bahwa mobilitas permanen semakin berkurang dan mobilitas nonpermanen yang ulang alik akan meningkat. Transportasi digantikan dengan sistem komunikasi yang semakin maju, sehingga orang tidak perlu berpindah tempat untuk dapat berkomunikasi.

Dalam kaitan dengan tahap-tahap transisi mobilitas itu, penyusunan kebijaksanaan pengelolaan perkembangan kependudukan pada Repelita VII dan seterusnya paling tidak perlu memperhatikan 5 (lima) kondisi sangat penting yang akan berpengaruh terhadap kondisi mobilitas dan persebaran penduduk pada satu-dua periode mendatang. Diperkirakan kondisi-kondisi tersebut dapat mempercepat terjadinya proses urbanisasi, sehingga perubahan pola-pola migrasi dan mobilitas penduduk di atas akan bisa saja terjadi dalam tempo yang sangat cepat, khususnya di Jawa Bali. Kelima hal tersebut adalah:

Pertama, industri dan perdagangan bebas yang segera akan menjadi era baru bagi bangsa kita, akan mendorong peningkatan sangat cepat terjadinya mobilitas barang dan mobilitas jasa serta mobilitas faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Perkembangan keadaan itu akan menciptakan suasana yang kondusif pada masyarakat secara luas,

sehingga akan menjadi 'pullfactor" bagi masyarakat secara luas untuk menjadi bersifat industri modern. Penduduk dan keluarga-keluarga akan serta merta berusaha meningkatkan kualitas hidupnya sehingga akan terjadilah "mobilitas sosial" atau mobilitas vertikal secara umum, dan akan terjadi perubahan-perubahan dalam stratifikasi sosial masyarakat dengan ciri terbentuknya kelas menengah yang lebih dominan. Meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat tersebut akan mendorong terbentuknya "gaya hidup baru" yang biasanya akan bercirikan mobilitas yang tinggi, khususnya pola mobilitas ualang alik. Keadaan itu akan terjadi secara internal (dalam negeri) dan internasional.

Kedua, revolusi dalam teknologi informasi didukung dengan kemajuan sarana transportasi akan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat kelas menengah dan kelas atas yang semakin besar jumlahnya, sehingga kemungkinan akan menghambat tingginya tingkat mobilitas permanen. Mobilitas penduduk secara non permanen akan menjadi semakin meningkat karena orang tidak perlu lagi bekerja dengan menetap di kota tempat mereka bekerja, namun cukup dengan menggunakan kemudahan-kemudahan komunikasi dan transportasi.

Ketiga, kebijaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan yang dilengkapi dengan program penanggulangan kemiskinan, termasuk Gerakan Pembangunan Keluarga Modern dengan Suasana Kota di Desa (Bangga Suka Desa), akan semakin digalakkan. Program-program tersebut diarahkan untuk mewujudkan kota-kota penyangga yang mandiri sebagai "buffer-zone" bagi perkotaan yang telah ada. Bahkan diupayakan agar dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta dana dan tenaga kerja untuk dapat mengalir ke daerah perdesaan di sekitar kota-kota besar dan kota menengah, sehingga diharapkan akan dapat secara cepat memberikan hasil terbentuknya penduduk berciri perkotaan pada daerah-daerah perdesaan. Kebijakan tersebut diperkirakan akan mampu menahan mengalirnya penduduk yang masih di perdesaan untuk berpindah ke perkotaan, sehingga mobilitas atau migrasi yang akan terjadi diharapkan adalah non permanen.

Keempat, pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI) yang akan semakin dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur perdagangan dan industri, termasuk untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri, haruslah mampu menyedot tenaga kerja dari daerah

Jawa Bali dan mampu menahan keluarnya tenaga kerja penduduk kawasan itu agar dapat membangun daerahnya. Dengan demikian, migrasi permanen diharapkan akan meningkat ke kawasan timur Indonesia dan migrasi non permanen akan semakin meningkat di kawasan barat Indonesia, khususnya Jawa-Bali.

Kelima, penurunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antar daerah dan antar wilayah, akan menimbulkan arus mobilitas atau migrasi tenaga kerja antar kabupaten dalam propinsi dan luar propinsi, dan mobilitas antar propinsi, baik permanen maupun non permanen. Jika mobilitas penduduk antar daerah ini tidak diwaspadai dan diarahkan dengan segera, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi penduduk pada daerah-daerah tertentu sehingga dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan sosial ekonomi inter dan antar propinsi (Suyono, 1996)

V. MOBILITAS PENDUDUK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya mobilitas penduduk merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah. Mobilitas penduduk juga merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pola mobilitas penduduk di negara-negara yang telah berkembang biasanya sangat kompleks menggambarkan kesempatan ekonomi yang lebih seimbang dan saling ketergantungan antar wilayah didalamnya. Sebaliknya di negara berkembang, biasanya pola migrasi menunjukkan pemusatan arus migrasi ke wilayah-wilayah tertentu saja, khususnya kota-kota besar. Dalam hal ini, tingkat mobilitas penduduk tidak terlepas dari karakteristik sosial ekonomi dan sosial budaya daerah yang bersangkutan.

Ketimpangan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya menyebabkan penduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya. Oleh karena itu dilakukan pembangunan daerah diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyasikan laju pertumbuhan antardaerah, antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta membuka daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan kawasan yang tertinggal

seperti kawasan timur Indonesia (KTI), disamping itu juga disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah seperti diamanatkan dalam GBHN 1993.

Ketimpangan dalam pertumbuhan dan pembangunan daerah yang merupakan dasar mobilitas penduduk dapat terjadi antar wilayah (propinsi, pulau) maupun antara desa dan kota. Adanya mobilitas penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan mencerminkan perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan. Selama masih terdapat perbedaan tersebut, mobilitas penduduk akan terus berlangsung (Budi Tjahyati, 1995).

Sesuai dengan tujuan yang telah digariskan, program transmigrasi harus selalu dikaitkan dengan pembangunan daerah. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan transmigrasi merupakan bagian yang integral dari suatu pola pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karenanya program transmigrasi dilakukan bersama-sama dengan pembangunan infrastruktur di daerah, pembangunan jalanjalan, pembangunan irigasi, pembangunan pemasaran dan berbagai bentuk pembangunan daerah lainnya. Dengan demikian perlu selalu diusahakan terdapatnya kaitan antara program transmigrasi dengan kegiatan ekonomi daerah. Sehingga pada dasarnya kebijaksanaan transmigrasi ditujukan kepada agro development atau suatu pembangunan pertanian daerah secara integral.

Agro development yang berbentuk pertanian campuran yaitu pertanian bahan makanan, hasil pertanian yang dapat diperdagangkan dan yang berbentuk peternakan perlu terus dikembangkan. Agro development sebagai bagian integral dari pembangunan regional dimaksudkan untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa dan Bali.

Pusat-pusat pertumbuhan yang satu diusahakan sambung menyambung dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya, menjadi kutub-kutub pertumbuhan yang merupakan area-area pertumbuhan dalam daerah-daerah tersebut. Melalui pusat-pusat pertumbuhan dan kutub-kutub pertumbuhan inilah diharapkan terjadi suatu pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada kelanjutannya diperkirakan mempunyai daya tarik terhadap para pendatang dari Pulau Jawa dan Bali tersebut (Tjiptoherijanto, 1985).

VI. KEMISKINAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

Dari sekitar 179 juta penduduk Indonesia pada tahun 1990, sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan (60,1%) dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Petani di Indonesia khususnya di Jawa mempunyai areal tanah yang kecil. Sebagai gambaran dari 7,8 juta petani tahun 1963, sebanyak 3,8 juta jiwa (49%) mengusahakan tanah di atas 0,5 ha (rata-rata 1,2 ha) dan sebagian besar petani (51%) mengusahakan rata-rata 0,27 ha tanah pertanian. Tanah pertanian yang dimiliki petani yang sudah sempit ini akan makin lebih menyempit lagi karena adanya sistem warisan (Munir, 1981).

Menurut Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan, penyebab kemiskinan di Jawa adalah karena padatnya penduduk, sebaliknya di luar Jawa proses itu terjadi karena jarangnyanya penduduk. Masalah ini harus dijawab dengan transmigrasi. Sebagai contoh, akibat dari padatnya penduduk, jumlah petani gurem (tak punya lahan) di Jawa dalam waktu 10 tahun (1983-1993) meningkat dari 7.403.000 menjadi 8.097.000 jiwa, atau 69,84 persen dari 10,94 juta jiwa total petani gurem (Kompas 25 Mei 1996).

Adanya involusi di sektor pertanian dan masuknya teknologi ke perdesaan menyebabkan penggunaan tenaga kerja manusia banyak digantikan oleh tenaga mesin. Sebagai contoh untuk mengolah tanah menggunakan traktor, menumbuk padi digantikan dengan mesin huller. Akibatnya kesempatan kerja di sektor pertanian semakin sempit.

Adanya kurang-gairahan pada sektor pertanian di perdesaan ini menyebabkan desakan kuat bagi tenaga kerja atau yang menganggur untuk pindah ke sektor nonpertanian atau pindah ke kota.

Berdasarkan data-data yang ada, usaha pemerintah untuk menurunkan kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Pada tahun 1970 diperkirakan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 60% atau 70 juta penduduk (World Bank, 1990 dalam Mantra, 1996). Angka tersebut menurun menjadi 40,1% atau 54,2 juta pada tahun 1976 dan terakhir pada tahun 1993 secara drastis turun menjadi 13,7% atau 25,9 juta penduduk.

Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut adalah sebagai perwujudan usaha-usaha pemberdayaan manusia agar terbebas dari belenggu kemiskinan, baik melalui berbagai program seperti program

bantuan kredit, pembangunan pertanian, pengadaan infrastruktur, termasuk program yang saat ini sedang dijalankan yaitu Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, ada tujuh target group yang dapat dientaskan melalui program transmigrasi. Ketujuh target group tersebut adalah:

- a. Buruh tani, petani yang tidak mempunyai lahan;
- b. Petani gurem, yaitu petani-petani yang mempunyai lahan dibawah seperempat hektar;
- c. Nelayan miskin dan buruh nelayan.;
- d. Penganggur, jumlahnya cukup banyak termasuk pengangguran yang terselubung;
- e. Kepala keluarga putus sekolah (drop out);
- f. Buruh miskin di kota-kota; dan
- g. Perambah hutan.

Menurut hasil penelitian dari Departemen Transmigrasi dan PPH, selama 4 tahun beturut-turut sejak tahun 1989 sampai tahun 1992, dengan menggunakan indikator tertentu maka rata-rata kesejahteraan para transmigran memang lebih baik dari rata-rata petani atau penduduk perdesaan di Indonesia, bahkan rata-rata petani di Pulau Jawa. Jika pada tahun pertama sebesar 55% transmigran mempunyai rata-rata pendapatan di atas garis kemiskinan, maka pada tahun 1992 meningkat menjadi 77% (Ahmad, 1994)

VII. PENUTUP

Sampai dengan tahun 1990 arus utama migrasi Indonesia masih tetap didominasi pada lintasan Jawa-Sumatera seperti pada beberapa puluh tahun yang lalu. Walaupun demikian, telah menunjukkan adanya sedikit pergeseran ke arah utara dan timur seperti ke Kalimantan, Maluku dan Irian Jaya. Kecenderungan perubahan atau pergeseran ini berkaitan erat dengan pola kebijaksanaan pemerintah yang baru, dimana lokasi-lokasi transmigran dan pembangunan semakin banyak dikembangkan ke daerah-daerah utara dan timur. Diperkirakan arus migrasi pada masa

berikutnya akan semakin besar ke arah tersebut, jika pembangunan ekonomi dan transportasi terus dikembangkan di daerah-daerah utara dan timur tersebut.

Arus utama migrasi antara Jawa dan Sumatera terjadi karena kedua pulau ini dari segi ekonomi dan sarana transportasi relatif lebih kuat, disamping secara historis pengiriman kelompok-kelompok transmigran memang dimulai dari Jawa ke Sumatera sejak tahun 1905.

Besarnya proporsi penduduk migran pada masing-masing propinsi di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi obyektif dari masing-masing propinsi tersebut. Propinsi yang banyak terdapat transmigran cenderung mempunyai penduduk migran yang lebih besar. Dengan demikian, transmigrasi dapat dikatakan sebagai salah satu indikator, atau kekuatan yang mampu mengundang arus migran antar propinsi yang lebih besar ke luar Jawa.

Propinsi-propinsi yang mempunyai banyak kegiatan ekonomi dan budaya juga menyebabkan di propinsi-propinsi tersebut banyak mempunyai penduduk migran. Dalam skala nasional, propinsi yang berpenduduk migran dengan dominasi transmigran terlihat paling menonjol di Propinsi Lampung. Sedangkan DKI Jakarta merupakan propinsi paling menonjol penduduk migrannya sebagai akibat pesatnya kegiatan ekonomi.

Dengan demikian persebaran penduduk akan lebih berhasil apabila daerah-daerah transmigrasi lebih dikembangkan ke wilayah-wilayah pulau di bagian utara dan timur. Sejarah menunjukkan bahwa transmigrasi telah berperan sebagai titik-titik api yang mampu mengundang kelompok-kelompok transmigran swakarsa. Sudah tentu dalam hal ini pembangunan ekonomipun harus dilakukan bersamaan dengan kebijaksanaan dalam penetapan daerah transmigrasi tersebut.

Kebijaksanaan dibidang pembangunan ekonomi yang mampu membuka kesempatan-kesempatan kerja baru sangat menentukan arah dan arus migrasi penduduk. Apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan dimaksudkan juga sebagai upaya untuk persebaran penduduk, maka pembangunan ekonomi daerah-daerah yang jarang penduduknya perlu mendapat perhatian khusus. Pergeseran arus migrasi yang lebih besar ke utara dan timur antara lain adalah karena semakin majunya pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Kecenderungan mobilitas penduduk ke kawasan timur Indonesia ini diharapkan terus berlanjut dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut perlu lebih dikembangkan lagi.

Dengan mengembangkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya daerah-daerah di luar Jawa, khususnya daerah-daerah di bagian utara dan timur, kondisi arah mobilitas penduduk dapat dirubah yang sekaligus memperbesar arus migrasi ke sana. Pembangunan daerah yang lebih merata pada akhirnya dapat dilihat sebagai upaya yang sesungguhnya untuk maksud persebaran penduduk.

Dalam jangka panjang migrasi penduduk diharapkan merupakan sesuatu yang berlangsung dengan sendirinya, karena penduduk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya semata-mata karena potensi dan kesempatan yang secara obyektif ada. Oleh karena itu, dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan serta sarana transportasi dan komunikasi di berbagai daerah, persebaran penduduk akan berjalan dengan sendirinya.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Rofiq. 1995. Kebijakan Transmigrasi di Indonesia. Makalah disampaikan dalam pengajaran pelatihan Pusat Studi Demografi II FE-UI, tanggal 9 Oktober. Jakarta.
- Ananta, Aris dan Evi Nurvidya Anwar. 1994. Projection of Indonesian Population and Labor Force 1995-2025. Jakarta: Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia, dalam buku Migrasi dan Distribusi Penduduk di Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Ananta, Aris. 1995. Transisi Mobilitas Penduduk Indonesia. Dalam buku Transisi Demografi, Transisi Pendidikan dan Transisi Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Biro Pusat Statistik. 1992. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1990. Seri S. No.2. Jakarta.
- . 1993b. Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Propinsi 1990-2025. Jakarta.
- . 1996. Pengarahan Mobilitas Penduduk Dalam Rangka Menyeimbangkan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan. Makalah disampaikan pada Rapat koordinasi Nasional Pembangunan Kependudukan, Maret. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN.
- Budi Tjahyati. 1995. Mobilitas Penduduk dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Daerah. Makalah dalam pertemuan POKJA Pengembangan Kebijakan Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan. 1994. Peluang Investasi di daerah transmigrasi. Jakarta: Pusat Informasi Daerah Transmigrasi, Direktorat Usaha Ekonomi.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993-1998. Jakarta: Sinar Grafika. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta.

- Kasto. 1995. Kondisi Demografi dan Pembangunan Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 25 September di Yogyakarta.
- Yudohusodo, Siswono. 1996. Kepadatan Penduduk di Jawa Sudah di Atas Ambang Batas. Kompas, 8:1-4, 25 Mei.
- Mantra, Ida Bagoes dan Nasruddin Harahap. 1993. Analisis Perkembangan Kependudukan Menurut Sensus Penduduk 1990, Dinamika Mobilitas Indonesia. Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Pusat Penelitian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Pusat Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- . 1996. Pemanfaatan Indikator Kependudukan dalam Perencanaan Program Pengentasan Kemiskinan. Makalah disampaikan dalam Rakornas Pembangunan Kependudukan pada bulan Maret. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Munir, Rozy. 1981. Pertumbuhan Penduduk dan Hubungannya dengan Masalah Ketenagakerjaan di Sektor Pertanian. Dalam buku Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Bina Aksara.
- Rencana Pembangunan Lima tahun ke VI 1994/1995-1998/1999. Buku III. Jakarta: Bappenas.
- Suyono, Haryono. 1996. Pokok-Pokok Sambutan Pada Seminar Penulisan Analisa Mobilitas Penduduk, Mei. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1985. Beberapa Tolok Ukur Keberhasilan Program Transmigrasi: Suatu Gagasan. Dalam buku Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun. Jakarta: UI-Press.
- . 1995. Pembangunan Persebaran Penduduk Dalam PJP II. Makalah dalam Kelompok Kerja Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.

Contributors to This Issue

Ahmad, Sirajuddin

Researcher, Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics, University of Indonesia, Jakarta.

Basri, Muhammad Chatib

Researcher, Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics, University of Indonesia, Jakarta

Hulu, Edison

Lecturer, Faculty of Economic Mommensen University, Medan.

Syafa'at, Nizwar

Researcher, Center for Agricultural-Social and Economic Research, Bogor.

Tjiptoherijanto, Prijono

Minister Assistant, Ministry of Population Republic of Indonesia, Jakarta.